

Judul : Birokrasi: Nasib 1,2 Juta CASN Masih Menggantung
Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

BIROKRASI

Nasib 1,2 Juta CASN Masih Menggantung

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum juga mengambil kebijakan atas nasib 1,2 juta calon aparat sipil negara atau CASN. Mereka terancam sebagai penganggur sementara dan tak memiliki penghasilan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widyantini hanya menyebut masalah penundaan pengangkatan CASN ini masih dibahas. "Sedang dibahas, sedang dibahas, ya. Sedang dibahas, ya," ujar Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rini hadir di Istana untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengumumkan THR dan gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Seusai pengumuman, wartawan sempat menyerukan pertanyaan terkait nasib 1,2 juta CASN ini.

Sehari sebelumnya, Rini mengatakan, masalah ini sudah dilaporkan kepada Presiden. Namun, semua masih menunggu keputusan Presiden.

Diberitakan sebelumnya, pengangkatan CASN, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pada tahun 2025 diundur dari rencana awal. Pengangkatan CPNS diundur menjadi Oktober 2025 dari rencana awal 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sementara pengangkatan calon PPPK yang seharusnya dilaksanakan pada Juni 2025 diundur menjadi Maret 2026. Berdasarkan data Menpan dan RB, CASN ini terdiri dari 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK.

Respons Ombudsman

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pengangkatan CASN Tahun Anggaran 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik.

"Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansi masing-masing. Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan," tutur Robert di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan tersebut. "Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN). Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solusi untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan, seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lain," ujar Robert.

Kedua, demi akuntabilitas publik, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya. Selain itu, juga agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi penganggur sementara.

Ketiga, sebagai *exit-strategy*, pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.

"Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaruan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan dan RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak)," kata Robert.

Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik.

Robert Na Endi Jaweng

Kepastian

Keempat, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan pemerintah.

"Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dan pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif pada upaya penyelesaian permasalahan penundaan pengangkatan CASN TA 2024," ujar Robert.

Sebagai catatan akhir, sebagai pintu bagi para pencari keadilan setelah menempuh mekanisme pengaduan ke internal pemerintah, yakni Kemenpan dan RB serta BKN, maka Ombudsman mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan malaadministrasi pada proses seleksi CASN TA 2024 melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 provinsi. Jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (*administrative justice*) dan ekspresi hak demokrasi warga.

(INA/NTA)